



Pusat Penelitian Badan Keahlian
Sekretariat Jenderal DPR RI

PERMASALAHAN PEREMAJAAN KERETA COMMUTER (KRL)

Ari Mulianta Ginting
Analisis Legislatif Ahli Madya
ari.ginting@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Komisi VI DPR RI telah memanggil Direktur Utama (Dirut) PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) Suryawan terkait rencana korporasi untuk melakukan impor kereta bekas dari Jepang pada tanggal 27 Maret 2023. Menurut Suryawan, rencana impor kereta bekas dari Jepang sebagai upaya yang harus dilakukan untuk menutupi kekurangan *trainset*.

Tahun 2023 terpaksa dilakukan impor karena ada kekurangan *trainset* yang tidak dapat dicukupi oleh produksi dalam negeri buatan PT Industri Kereta Api (INKA) (Persero). Produksi *trainset* yang telah dipesan oleh PT KCI kepada PT INKA membutuhkan waktu yang cukup lama sampai selesai produksi. Waktu yang lama tersebut menyulitkan PT KCI untuk menjawab kebutuhan kenaikan penumpang PT KCI untuk daerah Jakarta Bogor Depok Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek) terhadap pengguna Kereta Api Listrik (KRL).

Opsi peremajaan armada kereta lama atau *retrofit* juga menjadi pilihan yang tidak dipilih. Opsi ini sangat berisiko mengganggu pelayanan publik KRL Jabodetabek. *Retrofit* membutuhkan waktu kurang lebih 14 sampai dengan 17 bulan untuk mengganti sejumlah komponen yang sudah uzur. Armada yang dilakukan *retrofit* jelas berdampak terhadap jumlah KRL yang akan berkurang dan potensi layanan publik yang terganggu karena kapasitas angkut juga pasti berkurang.

Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh PT KCI, tingkat okupansi rata-rata KRL Jabodetabek pada saat jam kerja bisa mencapai 126 persen hingga akhir tahun 2023. Jika kondisi ini tercapai maka PT KCI harus mengoperasikan 86 rangkaian KRL per hari. Jika jumlah armada terus berkurang hingga tersisa 69 rangkaian maka tingkat okupansi tidak dapat ditampung oleh KRL Jabodetabek.

Namun, opsi impor yang diwacanakan oleh PT KCI juga memiliki beberapa permasalahan yang ditemukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Hasil rekomendasi yang dikeluarkan oleh BPKP menilai pengajuan impor kereta bekas oleh PT KCI tidak memenuhi kriteria. Hasil revidu BPKP tersebut menjadi landasan bagi Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi untuk mendorong PT KCI membatalkan impor kereta bekas dari Jepang. Selain itu, PT KCI juga didorong untuk melakukan *retrofit* dan kerja sama dengan PT INKA untuk produksi kereta di dalam negeri.

Bahkan, BPKP memberikan beberapa rekomendasi untuk PT KCI terkait wacana impor kereta dari Jepang. Rekomendasi tersebut antara lain: (1) PT KCI harus menyusun proyeksi kebutuhan sarana KRL beserta rencana pemenuhannya dengan lebih matang dan mengutamakan sumber daya dalam negeri; (2) melakukan inventarisasi, identifikasi, dan pemeriksaan unjuk memastikan kerusakan, jenis dan daftar suku cadang dan memastikan perawatan untuk mendorong keandalan kelaikan KRL; (3) melakukan modifikasi jumlah loop atau kereta dalam satu rangkaian

untuk mengatasi penumpukan penumpang di rute; (4) berkoordinasi dengan PT INKA untuk mendapatkan solusi terbaik atas sarana KRL yang dibutuhkan termasuk perawatan rutin, overhaul dan *retrofit*; dan (5) apabila diperlukan *retrofit* armada, PT KCI diminta melakukan secara bertahap agar tidak mengganggu pelayanan terhadap penumpang KRL.

Atensi DPR

Rencana impor kereta bekas dari Jepang yang akan dilakukan oleh PT KCI sejak tahun 2022 hingga tahun 2023 mendapatkan perhatian dari beberapa pihak. Rencana impor terpaksa dilakukan karena kondisi beberapa armada KRL yang harus dilakukan demi memastikan kelaikan dan keandalan pelayanan terhadap penumpang. Namun, rencana tersebut mendapatkan penolakan dari BPKP. Hasil revidi yang dilakukan oleh BPKP merekomendasikan untuk tidak melakukan impor. Komisi VI DPR RI memang telah memanggil Dirut PT KCI dan telah merestui rencana impor KRL yang akan dilakukan. Namun, berdasarkan hasil revidi, BPKP menolak wacana impor KRL yang dilakukan oleh PT KCI dan PT KCI harus dapat meninjau kembali kebijakan impor KRL tersebut. Sebaiknya, Komisi VI DPR RI memanggil kembali PT KCI dan BPKP dalam rapat kerja Komisi VI DPR RI. Rapat kerja tersebut diperlukan untuk melakukan paparan terbuka terhadap hasil revidi rencana impor kereta KRL bekas dari Jepang dan dilanjutkan dengan konfirmasi langsung dengan PT KCI.

Sumber

Koran Tempo, 7 & 10 April 2023;
Koran SINDO, 6 April 2023;
detik.com, 6 April 2023.

Minggu ke-2 April
(6 s.d. 12 April 2023)

2023



Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih

 <https://puslit.dpr.go.id>

 @puslitbkd_official

EDITOR

Polhukam
Simela Victor M.
Prayudi
Novianto M. Hantoro

Ekkuinbang
Sri Nurhayati Q.
Sulasi Rongiyati
Rafika Sari
Eka Budiyantri
Dewi Wuryandani

Kesra
Achmad Muchaddam F.
Yulia Indahri
Rahmi Yuningsih

LAYOUTER

Dewi Sendhikasari D.
Sita Hidriyah
Noverdi Puja S.

Anih S. Suryani
Teddy Prasetiawan
T. Ade Surya
Masyithah Aulia A.
Yosephus Mainake

Mohammad Teja
Nur Sholikhah P.S.
Fieka Nurul A.

©PuslitBK2023